

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NONFORMAL DI KECAMATAN TEMBALANG**

Oleh :

Rista Dewi Putriana, Hartuti Purnaweni

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usai enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD Nonformal terdiri dari KB (Kelompok Bermain, TPA (Taman Penitipan Anak), dan SPS (Satuan PAUD Sejenis). Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan PAUD sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, terang, dan menarik bagi anak-anak untuk bermain dan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang, faktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tembalang masih menghadapi masalah. Ditemukan PAUD yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan PAUD. Faktor penghambat adalah keterbatasan jumlah petugas untuk melayani lembaga PAUD, komunikasi yang kurang efektif, sehingga aparat pelaksana perlu memperhatikan satuan PAUD dalam penyediaan sarana dan prasarana.

**Kata Kunci : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Pendidikan,
Implementasi Kebijakan**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk negara berkembang yang merupakan contoh dimana terbaginya antara kaya dan miskin yang sangat rentan terhadap penciptaan generasi, banyak masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah yang belum bisa memperoleh dan memiliki akses sedikit untuk pendidikan bermutu dan bahkan diantara mereka harus putus sekolah dan menjadi anak jalanan atau terlantar. Pengaruh buruk dari hasil yang buruk pada anak usia dini dapat berdampak jangka panjang, yang mempengaruhi pencapaian sekolah, kerja, upah, kriminalitas, dan integrasi sosial. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem Pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan PAUD Nonformal di Kota Semarang masih tertinggal dengan target APK yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan karena pendidik

PAUD yang belum memenuhi kualifikasi kemudian sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam Permen No 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD. Terjadi kesenjangan antara PAUD yang didirikan oleh yayasan dengan PAUD yang berbasis masyarakat, perhatian dari aparat pelaksana memang kurang dan tidak dipungkiri jumlah satuan PAUD yang dilayani banyak. Penelitian yang dilakukan menfokuskan pada sarana dan prasarana di beberapa satuan PAUD di kecamatan Tembalang. Kecamatan Tembalang memiliki 149 satuan PAUD yang belum sepenuhnya memiliki sarpras yang layak untuk belajar dan bermain anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang
2. Mendiskripsikan dan Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan PAUD di Kecamatan Tembalang.

D. Kerangka Teori

Menurut George J. Gordon (dalam Syafiie, 2006) mengartikan Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan. Terdapat beberapa sudut pandang mengenai kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye (dalam Suwitri, 2009: 9) mengemukakan kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.

Menurut Wibawa (1994) (dalam Koryati, Dwi 2004: 10),

Implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.

Menurut petunjuk teknis pedoman penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini nonformal dan informal 2012, terdapat Peserta Didik, Pendidik, Aspek yang dikembangkan dalam pembelajaran PAUD, dan sarana dan prasarana.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kriteria di atas untuk menilai implementasi kebijakan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang.

Dalam upaya pelaksanaannya, akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Komunikasi yang terdiri atas pemahaman dan sosialisasi implementor terhadap kebijakan PAUD

- 2) Sumber daya, meliputi kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana PAUD.
- 3) Disposisi, meliputi tanggapan atau respon implementor terhadap implementasi PAUD, komitmen implementor terhadap implementasi PAUD.
- 4) Struktur birokrasi, dalam hal pelaksanaan kebijakan memang struktur birokrasi memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek dalam organisasi adalah SOP atau prosedur kerja ukuran dasarnya, maka implementor berpedoman pada SOP dalam implementasi PAUD.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan desain penelitian deskriptif . Penelitian dilakukan pada angkutan umum di wilayah Kecamatan Tembalang. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive dengan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi ke Dinas, UPTD Pendidikan dan Satuan PAUD di Kecamatan Tembalang. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2010:256), yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi/ penyimpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal di Kecamatan Tembalang

Implementasi Kebijakan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang dalam penelitian ini dipaparkan melalui hal-hal yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan PAUD nonformal dengan keadaan yang terjadi di lapangan yaitu:

1. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengamatan peneliti di tiga satuan PAUD di

Kecamatan Tembalang dapat diketahui bahwa belum seluruh PAUD mempunyai sarana dan prasarana yang baik, baik diartikan memenuhi prinsip sarana dan prasarana sesuai Peraturan Menteri No 58 Tahun 2009. PAUD Al-Azam yang merupakan lembaga pendidikan nonformal terbaik di Kecamatan tembalang sudah sangat memenuhi prinsip sarana dan prasarana yang sesuai dengan peraturan karena didukung oleh yayasan yang baik satuan PAUD ini memiliki dana yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan serta alat permainan edukatif yang dimiliki sangat banyak dan cukup untuk kebutuhan anak.

PAUD Negeri Sendangmulyo juga memiliki sarana dan prasarana di dalam ruangan dan di luar ruangan. Sekolah ini memiliki halaman bermain yang luas serta kebersihannya terjaga dan juga sangat nyaman bagi anak-anak. Alat permainan edukatif juga beragam karena mereka

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dijadikan objek pembelajaran bagi anak-anak, sedangkan Pos PAUD Mekar Ceria keadaannya sangat berbeda jauh dengan kedua PAUD sebelumnya. Pos PAUD Mekar Ceria yang berbasis masyarakat dan berdirinya melalui masyarakat bukan dari lembaga atau yayasan sehingga sarana dan prasarannya sangat minim. Pos PAUD Mekar Ceria hanya memiliki ruangan di dalam kelas dan masih menggunakan tempat Ibadah untuk mengadakan pembelajaran selain itu, alat permainan edukatif yang dimiliki sangat sedikit dan kebutuhan anak bermain dan belajar menjadi terhambat.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan PAUD Nonformal di Kecamatan Tembalang

a. Komunikasi.

Perkumpulan rutin yang dilakukan dari aparat pelaksana dengan gugus-gugus PAUD merupakan bentuk komunikasi yang baik.

Namun, pemahaman tentang suatu kebijakan PAUD masih belum dipahami oleh lembaga tersebut berkaitan dengan metode pembelajaran yang baik yang sesuai dengan kebutuhan anak.

b. Sumberdaya

Sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Dalam penelitian ini sumber daya manusia menjadi faktor penghambat, hal tersebut disebabkan karena sumberdaya manusia yang ada tidak sebanding dengan jumlah satuan PAUD yang harus dilayani. Selain itu keberhasilan proses implementasi juga dipengaruhi oleh fasilitas yang ada, fasilitas yang dimiliki aparat sudah cukup baik.

c. Disposisi

Respon aparat pelaksana pada salah satu satuan PAUD yang berbasis masyarakat kurang baik berkaitan dengan izin operasional komitmen aparat pelaksana terlihat dengan pertemuan yang dilakukan dan

bantuan rutin yang dilakukan oleh satuan PAUD walaupun belum seluruhnya bias menerima bantuan tersebut

d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi sangat baik dibuktikan dengan aparat pelaksana yang setiap melaksanakan tugasnya berlandaskan pada SOP yang ada.

Saran

1. Dinas Pendidikan khususnya Seksi PAUD dan UPTD Pendidikan Kecamatan lebih memperhatikan satuan PAUD dalam penyediaan sarana dan prasarana.
2. Sumber daya harus diperbaiki, bagi aparat pelaksana untuk meningkatkan kinerja perlu menambah jumlah personil dengan penerimaan pegawai baru.
3. Perkumpulan gugus PAUD harus menjadi komunikasi yang efektif antara Dinas Pendidikan dengan satuan PAUD.tidak hanya dalam pemberian informasi secara

lisan tetapi menjelaskan dengan teknis agar satuan PAUD dapat memahami dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Koryati, Dwi dkk. 2004. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta : YPAPI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Petunjuk Teknis “Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal 2012”. 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mansur, Dr., M.A. 2007. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya: PMN
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Syafiie, Inu kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Asdi Mahasatya.
- Winarno, Budi 2007. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Permen No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD